

PENGANGKATAN DAN PERAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PADA PERSEROAN TERBATAS (Studi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua)

Oleh : Anwar Mochammad Roem¹ dan Melki Sedek²

Abstrak : Setiap perseroan Terbatas wajib menerapkan Tata Kelola baik pada sehingga aspek keseimbangan tidak hanya keseimbangan Internal seperti hubungan antar organ perusahaan, tetapi juga lingkungan eksternal Perusahaan dan akan tercipta keseimbangan kepentingan antara semua pihak (*stakeholders*) dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dengan melihat fungsi dan tugas dari Dewan komisaris bahwa suatu Perseroan Terbatas dapat terlaksana dengan baik atau dapat memberi keuntungan kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan pihak terkait lainnya, seharusnya pada tahap awal pemilihan dan pencalonan sudah harus sesuai dengan ketentuan Intern Bank Papua sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Pada Perseroan Terbatas bisa efektif.

Kata Kunci : Pengangkatan, Peran, Komisaris, Tata Kelola, Perseroan Terbatas

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.³

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

² Alumni Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

³ M.Yahya Harahap, S.H. , *Hukum Perseroan Terbatas*(Jakarta : sinar Grafika), hlm 33

Perseroan terbatas merupakan wadah untuk melakukan kegiatan usaha, yang membatasi tanggung jawab pemilik modal, yaitu sebesar jumlah saham yang dimiliki sehingga bentuk usaha seperti ini banyak dinikmati, terutama bagi perusahaan dengan jumlah modal yang besar. Kemudahan untuk menarik dana dari masyarakat dengan jalan penjualan saham yang juga merupakan satu dorongan untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT).⁴ Tujuan Perusahaan adalah mencari keuntungan dalam kegiatan ekonomi, pada perusahaan yang menjadi pelaku ekonomi di Indonesia tidak terbatas pada perusahaan swasta tetapi ada BUMN dan BUMD yang sama-sama bertujuan mencari keuntungan kepada pemegang saham (*shareholder*)

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang Perseroan Terbatas yang mengatur bagaimana perseroan terbatas dapat dikelola dengan baik oleh struktur / organ dari perseroan terbatas, dalam upaya ini idealnya undang-undang Perseroan Terbatas ini dapat mengawal perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sesuai undang-undang perseroan mengatur tentang organ Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris, ketiga organ tersebut melakukan metabolisme tubuh di dalam badan hukum Perseroan Terbatas untuk menjalankan roda kegiatan perseroan sesuai visi dan misinya, kegiatan ini meliputi fungsi pembuatan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 pasal 15 pasal 1, huruf (h) menjelaskan : “ tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris “

⁴Badriyah Rifai Amirudin, *Artikel Pendidikan, Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Tubuh Perusahaan Publik*,

Tujuan dibentuknya perseroan terbatas diantaranya memberi keuntungan pemegang saham (**shareholder**), untuk menjaga kepentingan pemegang saham maka pelaksanaan perseroan terbatas di cerminkan dari penerapan *Corporate Governance* yang mencakup tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi yang menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan efektif dari Dewan Komisaris terhadap perseroan dan pertanggung jawaban Direksi kepada Pemegang Saham, *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)* selaku Otoritas Moneter.

Untuk penerapan pada perseroan khususnya pada dunia perbankan regulasi yang dalam hal ini *Otoritas Jasa Keuangan* atau OJK telah mengeluarkan peraturan yang juga sebagai pedoman dalam mengelola perseroan terbatas / Bank sesuai nomor : 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Pada Industri Perbankan harus berlandaskan lima prinsip dasar yaitu : *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. *Responsibility* (pertanggung jawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. *Fairness* (kesetaraan/ kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Terhadap implementasi penerapan tata kelola pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, lebih ditekankan pada Aspek Struktur bahwa untuk mendapat penerapan Tata Kelola yang baik pada perseroan, peran aktif organ perseroan dalam hal ini Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi pada perseroan yang mempunyai peranan aktif untuk menentukan penerapan Tata Kelola baik atau tidaknya suatu tata kelola perseroan.

Berdasarkan pada pemaparan di atas, maka penulis mengangkat isu terkait penerapan tata kelola yang baik pada Perseroan Terbatas khususnya penerapan tata kelola pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

PEMBAHASAN DAN ANALISA

Peranan Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris terhadap penerapan Tata Kelola di PT. Bank Papua.

Pada dasarnya setiap perseroan Terbatas wajib menerapkan Tata Kelola baik pada sehingga aspek keseimbangan tindak hanya keseimbangan Internal seperti hubungan antar organ perusahaan, tetapi juga lingkungan eksternal Perusahaan dan akan tercipta keseimbangan kepentingan antara semua pihak (*stakeholders*) dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

Pemahaman penerapan sama juga oleh *Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG)*, yaitu mendefinikan GCG / tata kelola sebagai proses dan stuktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *Stakeholder* yang lain berdasarkan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.⁵

⁵ *Institute For Coporate Governance (IICG) tahun 2009*

Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Komisaris pada Perseroan Terbatas (PT)

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 pasal 110 ayat 1 bahwa :

- Ayat (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
- a. Dinyatakan pailit.
 - b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit / atau
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Dalam Undang-Undang Perseroan belum secara jelas mengatur tata cara pemilihan dan pengangkatan Dewan Komisaris. Pada pasal 15 ayat 1 huruf (h), tentang tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pasal 111, ayat 4 menjelaskan bahwa tata cara pemilihan dan pengangkatan Dewan Komisaris diatur secara teknis dalam anggaran dasar dari Perseroan Terbatas yang berwenang menetapkan pesyaratann tambahan untuk tata cara pemilihan dan pengangkatan Dewan Komisaris pada Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan pada Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, pasal 15 tentang Dewan Komisaris mengatur pemilihan dan pengangkatan Dewan Komisaris yang masih merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Dari hasil wawancara dengan kepala Divisi Kepatuhan (sebagai pembuat laporan Tata Kelola / GCG PT.Bank Papua) bahwa untuk pemilihan

Calon Dewan Komisaris dan Direksi belum berpedoman/ memperhatikan ketentuan tersebut, dari proses yang berjalan bahwa untuk pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan juga Direksi langsung di tentukan oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) diluar dari RUPS dan kemudian nama-nama atau calon Dewan Komisaris dan Direksi di bahas atau dikomitekan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi untuk di nilai dan di ajukan di dalam RUPS untuk dipilih oleh Pemegang Saham.⁶ Untuk PT. Bank Pembangunan Daerah Papua mempunyai jumlah Dewan Komisaris sebanyak 4 orang dan sama dengan jumlah Direksi.

Didalam POJK nomor : 55/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dimana prinsip dasar dari Tata Kelola / *Good Coporate Governance (GCG)* yaitu **keterbukaan Inforasi (*Transparency*)**, **Akuntabilitas (*Accountability*)**, **Pertanggung Jawaban (*Responsibility*)**, **Kemandirian (*Indepandency*)**, **Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)** atau di kenal dengan singkatan **TARIF**. Dari Prinsip dasar Tata Kelola yang bertentangan Intervensi / Kemandirian (*Indepandency*) yang intinya mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa prosedur untuk pemilihan dan pengangkatan Dewan Komisaris belum memperhatikan peraturan regulasi maupun peraturan intern Bank yaitu BPP Tata Kelola buku 1 sampai dengan buku 11 dan juga Buku Panduan Seleksi calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi bahwa harus adanya surat keterangan pengalaman di bidang perbankan ataupun mempunyai latar belakang hukum sehingga hal ini yang belum diperhatikan ataupun menjadi bahan evaluasi bagi manajemen dan juga Pemegang Saham Pengendali (PSP).

⁶ Divisi Kepatuhan, Kepala. Abdul Karim. SH, MH

Tugas, Fungsi dan lama waktu menjabat sebagai Dewan Komisaris pada Perseroan Terbatas (PT)

Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 6 yaitu : (ayat 6) Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Sebagaimana telah di jelaskan Tugas dan Fungsi dari Dewan Komisaris sebelumnya, namun penulis akan menjelaskan kembali secara garis besar bahwa tugas dan fungsi secara mendasar/ pokok yaitu dalam hal pengawasan terhadap jalannya perseroan terbatas. Dewan Komisaris merupakan perwakilan dari Pemegang Saham Pengendalai (PSP) yang di tempatkan dalam perseroan dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Papua untuk pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris juga dibantu oleh Komite Dewan Komisaris untuk memberikan masukan ataupun pertimbangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan nasehat, masukan atau sumbangsi pemikiran kepada Direksi dalam mengelola Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 29/DIR-BPD/VI/2017 tentang Pengangkatan Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yaitu :

1. Komite Remunerasi dan Nominasi
2. Komite Pemantau Risiko, dan
3. Komite Audit.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam pengawasan secara efektif terhadap jalannya operasional Perseroan Terbatas. Namun dari hasil analisis dan wawancara dengan Kepada Divisi Kepatuhan sebagai pembuat laporan

hasil penilaian tata kelola PT. Bank Papua bahwa untuk tahun 2017 Dewan Komisaris belum menjalankan tugas dan fungsi yang efektif di PT. Bank Papua dikarenakan terjadi kekosongan Dewan Komisaris dan sampai sekarang masih dalam tahap pencalonan dan seleksi *Fit And properes* yang dilakukan oleh *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*.

Untuk masa waktu menjabat bagi Komite Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sedangkan untuk masa waktu menjabat sebagai Dewan Komisaris paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak di ditetapkan dalam RUPS oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Peran Aktif Dewan Komisaris terhadap penerapan Tata Kelola yang baik pada Perseroan Terbatas (PT)

Dari hasil analisis secara “*Yuridis Normatif*” terhadap hasil Laporan Tata Kelola tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua serta analisis secara “*Empiris*” untuk meyakinkan terhadap hasil laporan Tata Kelola PT. Bank Pembangunan Daerah Papua untuk periode pelaporan **Tata Kelola tahun buku 2015, 2016, dan semester I tahun 2017** untuk aspek yang dinilai dari 11 Faktor diantaranya Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Kelengkapan dan pelaksanaan Tugas Komite dari hasil *Assessment* yang di lakukan oleh Divisi Kepatuhan dengan hasil Cukup Baik atau masih belum efektif untuk hasil pengawasan dari Dewan Komisaris dan juga Komite Dewan Komisaris.

Sebagaimana sudah di jelaskan tentang Tugas dan Fungsi Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan

kepengurusan PT. Bank Papua.⁷ Dewan Komisaris juga memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktik *good corporate governance* (GCG) yang diterapkan PT. Bank Papua dan apabila dinilai perlu, dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan PT. Bank Papua.

Fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris terwujud dalam 2 (dua) tingkatan yaitu :

1. Level *Performance*, yaitu fungsi pengawasan di mana Dewan Komisaris memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi serta memberikan masukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Level *Conformance*, yaitu berupa pelaksanaan kegiatan pengawasan pada tahap selanjutnya untuk memastikan nasihat telah dijalankan serta dipenuhinya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar yang berlaku.

Sehingga dari hasil analisis dengan Kondisi berkurangnya Komposisi Dewan Komisaris maka fungsi dari pengawasannya juga tidak efektif sehingga dapat berdampak pada kelangsungan Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian penulis dengan permasalahan yang di kemukan dapat di simpulkan bahwa pemilihan dan pengangkatan Dewan Komisaris belum memperhatikan ketentuan regulasi dalam hal ini Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Peraturan

⁷ Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 6

Intern Bank Papua sehingga dalam tahap pemilihan dan pecalonan Dewan Komisaris belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arafart, Wilson, 2006, *Manajemen Perbankan Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Badriyah Rifai Amirudin, *Artikel Pendidikan, Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Tubuh Perusahaan Publik*,
- Drs. O.P. simorangkir, 2004, *pengantar lembaga keuangan bank dan nonbank*, Ghalia Indonesia, Bogor
- I Nyoman Tjager, et.al, 2003, *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Perhalindo, Jakarta.
- Kasmir, 2008, *Manajemen perbankan*, rajawali pers, Jakarta
- M.Yahya Harahap, S.H. , *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta : sinar Grafika)
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003)
- Rahmannia, safira, 2010, *analisis Kinerja Efisiensi Teknis Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)*